



Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/finetech>



Analisis Penerapan SAK ETAP pada BUMDes Mawa Raharja Desa Cibiru Wetan

¹Humaira S. R. A. A. Juhara, ²Ifan Ferdian Setiadi, ³Rifa Anugravia Ghifari, ⁴Wildan Arif Purnama, ⁵Nugraha, ⁶Fitrina Kurniati

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Correspondence: E-mail: irajuhara0107@upi.edu

ABSTRACT

In the digital era, technological advances have a huge impact on the financial sector. Digitalization makes financial management more open and efficient, especially in the accounting field. In the public sector, accounting is now used openly and neatly according to applicable standards to help achieve organizational goals. Regionally owned enterprises as one of the public sector institutions also now have accounting standards in managing their finances. SAK ETAP is a standard used in regionally owned enterprises. Applicable standards-based accounting makes it easier to analyze various financial reports such as profitability analysis. The aim of this research is to analyze the management of village-owned enterprises, analyze financial management according to SAK ETAP and analyze the profitability of Mawa Raharja village-owned enterprises. Data collection uses interviews and documentation. The research results show that an entity must prepare 5 (five) financial reports, namely: a statement of financial position, a profit and loss statement, a statement of changes in capital, a statement of cash flows, and notes to the financial statements. Of the 5 reports, BUMDes Mawa Raharja has just made a profit and loss report in 2022 but it is still incomplete.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 November 2023

First Revised 1 Februari 2024

Accepted 10 March 2024

First Available online 30 April 2024

Publication Date 30 April 2024

Keyword:

Accounting, Accounting Standard, SAK ETAP, Public Accounting, Village Owned Enterprise

1. INTRODUCTION

Secara umum, organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu organisasi bisnis dan organisasi nirlaba. Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal sumber pendanaan, tujuan pendirian, pengelolaan, dan laporan keuangan. Organisasi bisnis biasanya mendapatkan dana dari pemilik atau kreditor dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, organisasi nirlaba mendapatkan dana dari donatur tanpa mengharapkan imbalan. Organisasi bisnis beroperasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari produksi barang dan jasa. Di sisi lain, organisasi nirlaba juga menghasilkan barang dan jasa, tetapi tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan. Pendapatan yang diperoleh organisasi nirlaba digunakan untuk kesejahteraan anggota, tanpa harapan pengembalian dari donatur (Rachmapurnami, 2021). Sementara itu, BUMDes merupakan suatu lembaga yang menjalankan usahanya dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun organisasi nirlaba dan BUMDes memiliki tujuan dan struktur yang berbeda, keduanya beroperasi dalam lingkungan hukum yang sama dan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti organisasi nirlaba, BUMDes juga mendapatkan sebagian besar pendanaannya dari sumber eksternal, seperti pemerintah atau donatur (Rachmapurnami, 2021). Namun, berbeda dengan organisasi nirlaba, BUMDes memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan usahanya, pengelolaan dana oleh BUMDes berdasar pada pedoman atau prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Prinsip-prinsip ini memandu BUMDes dalam menjalankan operasionalnya. Prinsip keadilan menjamin akses usaha yang merata dan bebas diskriminasi, sementara prinsip efisiensi mendorong BUMDes untuk meningkatkan kualitas pelayanan, akses, dan relevansi usaha. Oleh karena itu, BUMDes seharusnya secara sistematis dapat melakukan pencatatan atau pembukuan dari seluruh transaksi yang terjadi setiap harinya (Arafah, Inapty, & Astuti, 2022). Hal ini tentu saja berimplikasi pada standar yang seharusnya dijadikan oleh BUMDes sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan tersebut. Pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan BUMDes mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal ini dikarenakan SAK ETAP adalah standar yang paling cocok digunakan oleh BUMDes sebagai salah satu entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal dan tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013).

Dalam pengelolaan dana BUMDes, SAK ETAP memberikan kerangka ketentuan laporan keuangan yang penting. Oleh karena itu, laporan keuangan BUMDes harus mencakup elemen-elemen berikut yang sesuai dengan SAK ETAP (2013): Neraca, yang pada akhir periode menyajikan posisi keuangan entitas; Laporan Laba Rugi, yang menyajikan hasil keuangan operasional entitas selama periode berjalan; Laporan Perubahan Ekuitas, yang

menyajikan perubahan modal entitas selama periode berjalan; Laporan Arus Kas, yang menyajikan arus kas yang masuk dan kas yang keluar selama periode berjalan; dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang menyajikan informasi tambahan yang relevan untuk pemahaman laporan keuangan. Meskipun BUMDes biasanya membuat laporan kas harian, tetapi laporan kas harian ini pada akhir periode tidak mampu menyajikan posisi keuangan dan informasi tentang rugi atau laba entitas untuk periode yang berjalan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan BUMDes yang baik adalah laporan keuangan yang mampu disajikan sesuai dengan SAK ETAP, sehingga laporan tersebut berbentuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, nilai nominal dan transaksi ril adalah pedoman pengakuan dan perhitungan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus direkonstruksi dan disusun ulang sesuai dengan SAK ETAP jika ditemukan ketidaksesuaian. Meski demikian, BUMDes harus berkonsultasi dengan seorang profesional akuntansi untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap semua aspek SAK ETAP (Susanto, 2018).

Akan tetapi, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang salah satunya dilakukan oleh Rozalia, Anitasari, dan Ferina (2021) diungkapkan bahwa BUMDes Luhur Sepakat di Desa Sido Luhur belum menerapkan SAK ETAP dengan tepat karena belum membuat laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CaLK. Kemudian, penelitian yang telah dipublikasikan Afkarina, Probowulan, dan Maharani (2022) pun menunjukkan bahwa BUMDes Arum Jaya Mandiri di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember baru membuat neraca dan laporan laba rugi yang membuat BUMDes tersebut belum mampu menerapkan SAK ETAP secara penuh. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa BUMDes di Indonesia masih belum mampu menerapkan SAK ETAP dengan baik. Untuk itu, peneliti berencana melakukan penelitian serupa untuk menganalisis penerapan SAK ETAP dengan objek BUMDes yang berbeda, yaitu pada BUMDes Mawa Raharja yang terletak di Kabupaten Bandung tepatnya di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi.

Untuk dapat menciptakan laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan sesungguhnya, pengelolaan keuangan BUMDes harus berpedoman pada SAK ETAP. Kualitas informasi keuangan yang baik itu tentunya akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang harus diambil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Mawa Raharja dan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dialami dalam proses penerapannya. Dengan begitu, nantinya diharapkan penelitian ini dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Mawa Raharja.

2. METHODS

Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2017) ialah suatu pendekatan penelitian yang tujuan perolehan datanya adalah untuk kegunaan tertentu dengan karakteristik rasional, empiris, dan

sistematis. Untuk itu, melalui metode ini, peneliti hendak mendeskripsikan pandangan, pendapat, dan keadaan yang diamati dari objek penelitian. Sementara itu, wawancara kepada informan yang memiliki peran penting adalah prosedur pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini. Informan tersebut yaitu direktur BUMDes Mawa Raharja di Desa Cibiru Wetan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan dokumentasi dari laporan keuangan yang sudah dibuat oleh BUMDes Mawa Raharja. Data dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan yang merupakan data primer, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui hasil dokumentasi, bahan pustaka, telaah literatur, dan lain-lain. SAK ETAP adalah alat analisis yang diterapkan dalam penelitian ini.

3. RESULTS AND DISCUSSION

BUMDes ialah suatu lembaga usaha berbadan hukum milik pemerintah desa yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi desa dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. BUMDes Mawa Raharja terletak di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. BUMDes ini sudah berdiri dari sebelum tahun 2010 di bidang perdagangan, pinjaman, wisata, dan pengelolaan air yang kemudian baru direvitalisasi kembali tahun 2021. Setelah direvitalisasi, BUMDes Mawa Raharja ini bergerak dalam 5 bidang usaha, yaitu pengelolaan air sumber artesis, pengelolaan sampah, wisata, perdagangan dan kemitraan, serta pelayanan internet service provider. Wisata yang dimiliki Desa Cibiru Wetan adalah wisata tangga seribu dan wisata edukasi berupa studi tiru pemerintahan desa. BUMDes Mawa Raharja ini didirikan untuk melakukan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena sebagian besar konsumen dari BUMDes ini adalah masyarakat Desa Cibiru Wetan. Dalam pendirian dan operasionalnya, modal BUMDes ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru Wetan yang sudah rutin disertakan dari tahun 2019 dengan besaran setiap tahunnya 50 sampai 60 juta.

Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Siti Maulani yang berperan sebagai direktur BUMDes Mawa Raharja, diperoleh informasi bahwa "...terdapat enam orang karyawan operasional BUMDes di kantor untuk urusan administrasi dan pelayanan konsumen...". Selain itu, untuk masing-masing bidang usaha, terdapat manajer dan pekerja harian yang berfokus pada bidang usahanya masing-masing. Sementara itu, untuk pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan oleh satu orang bendahara di kantor operasional. Bendahara tersebut mengelola keuangan dari seluruh unit usaha BUMDes secara terpusat. Ibu Lani menyebutkan bahwa "...BUMDes Mawa Raharja sudah membuat perencanaan keuangan setiap tahunnya dalam bentuk RAB dan Proposal Penyertaan Modal sejak tahun 2022 yang berisi tentang proyeksi pendapatan dan rencana pengeluaran BUMDes...". Untuk pencairan dana nya pun biasanya sebesar dana yang diajukan di RAB dan Proposal Penyertaan Modal yang telah disusun.

Berdasarkan hasil observasi berupa wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi di BUMDes Mawa Raharja masih tergolong

sangat sederhana karena pencatatan transaksi harian hanya menggunakan buku kas keluar dan buku kas masuk. Hal ini disebabkan karena setiap unit usaha masih terkendala dalam pengelolaan keuangannya masing-masing sehingga keuangan seluruh unit masih dikelola secara terpusat oleh bendahara umum BUMDes. Pencatatan keuangan dilakukan menggunakan aplikasi *Spreadsheet* yang dapat diakses oleh direktur, sekretaris, dan bendahara BUMDes. Penggunaan *Spreadsheet* tersebut ditujukan untuk mempermudah pencatatan dan pengarsipan data keuangan.

Dalam melaksanakan operasionalnya, BUMDes membutuhkan suatu laporan keuangan yang mampu menunjukkan kondisi keuangan usaha yang dijalaninya. SAK ETAP merupakan suatu standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat dijadikan pedoman oleh BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan SAK ETAP (2013) disebutkan bahwa Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik hendaknya mampu membuat lima laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan CaLK atau catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, BUMDes Mawa Raharja baru membuat laporan laba rugi saja. Biasanya, laporan yang dibuat di tahun-tahun sebelumnya adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Akan tetapi, neraca tersebut tidak dilanjutkan di periode setelah revitalisasi karena adanya kesulitan dalam penilaian seluruh aset yang dimiliki sehingga neraca yang dibuat di periode sebelum revitalisasi pun tidak dapat menggambarkan kondisi keuangan BUMDes yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa SAK ETAP belum diterapkan oleh BUMDes Mawa Raharja karena BUMDes belum mampu membuat seluruh laporan keuangan yang disyaratkan pada SAK ETAP, tetapi BUMDes baru mampu menyusun laporan laba rugi saja.

BUMDes Mawa Raharja sudah menyusun laporan keuangan secara rutin pada setiap periodenya. Tanggal 1 Januari sampai 31 Desember adalah periode satu tahun laporan keuangan yang ditetapkan. Hal ini sudah sesuai dengan persyaratan frekuensi pelaporan keuangan pada SAK ETAP, yaitu minimal satu tahun sekali. Seluruh transaksi pun sudah dicatat sesuai dengan biaya historis baik itu saat perolehan maupun saat pemberian seluruh jasa dari lima unit yang dimiliki BUMDes.

Sementara itu, untuk dasar akuntansi yang diterapkan di BUMDes Mawa Raharja ialah basis kas sehingga seluruh transaksi dicatat berdasarkan kas yang masuk dan kas yang keluar. Hal ini tidak selaras dengan basis akuntansi pada SAK ETAP, yaitu basis akrual. Akan tetapi, sebenarnya direktur BUMDes Mawa Raharja pun ingin mengubah basis akuntansi yang digunakan menjadi basis akrual karena dapat lebih mempermudah dalam pembuatan laporan keuangannya, tetapi saat ini masih sulit diterapkan karena masih banyak keterbatasan khususnya dalam segi sumber daya manusia.

Berikut adalah rincian laporan keuangan yang sudah dibuat oleh BUMDes Mawa Raharja.

a. Neraca

Neraca atau Laporan Posisi Keuangan terakhir dibuat BUMDes Mawa Raharja pada tahun 2020, yaitu sebelum dilakukan revitalisasi. Berikut adalah model Neraca per bulan yang dibuat oleh BUMDes Mawa Raharja

Tabel 1. Model Neraca BUMDes Mawa Raharja per 31 Januari 2020

No	Uraian Aktipa	Jumlah	Uraian Pasipa	Jumlah
	AKTIPA LANCAR		HUTANG LANCAR	xxx
1	Kas Raksa Desa	xxx	1. Modal Bergulir	
2	Kas Desa Peradaban	xxx	2. Simpanan Sukarela	
3	Piutang Pinjaman Bergulir	xxx	3. Simpanan Hari Raya	
4	Piutang Pinjaman DP	xxx	4. Bantuan Pisik	
5	Perdagangan & Jasa	xxx		
	AKTIVA TETAP			
	Inventaris Kantor/Pembelian			
6	Molen	xxx	HUTANG JANGKA PANJANG	
7	Akta BUMDES	xxx	1. Pihak Ke III	
8	Tabung Pemadam	xxx	2. Anggota	
9	1 Unit Komputer	xxx	3. BANK	
10	Pembayaran Pajak Tahun 2016	xxx	4. P2KP	
11	Alat Mainan Wisata Tangga 1000	xxx	MODAL SENDIRI	
12	Bayar PPh 21 Jan s/d Juni 2017	xxx	1. Simpanan Wajib	
13	Pembuatan Rek Bumdes	xxx	2. Sisa Hasil Usaha	
			Jumlah Modal Sendiri	
			Dana Desa	
			Rugi/Laba berjalan	xxx
	Total	xxx	Total	xxx

Sumber: Dokumentasi Neraca BUMDes Mawa Raharja per 31 Januari 2020

Dalam SAK ETAP, minimal suatu neraca memuat pos kas dan setara kas, persediaan, piutang usaha dan piutang lainnya, properti investasi, aset tetap, aset tak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, kewajiban diestimasi, aset dan kewajiban pajak, dan modal atau ekuitas. Sementara itu, neraca yang dibuat oleh BUMDes Mawa Raharja sebagian sudah menunjukkan akun-akun yang selaras dengan SAK ETAP. Akan tetapi, terdapat beberapa akun yang ditempatkan bukan pada posisi yang seharusnya, seperti perdagangan & jasa serta pembayaran PPh 21 yang seharusnya dicantumkan dalam laporan laba rugi, bukan pada neraca. Selain itu, nominal pada hutang lancar dicantumkan setelah dijumlahkan tanpa ada rincian yang jelas. Begitupun dengan modal sendiri yang nominalnya Rp0,00, padahal pada laporan perubahan modal sudah tertera nilai modal akhirnya.

Direktur BUMDes Mawa Raharja pun menambahkan bahwa aset tetap yang disajikan dalam neraca itu hanya sebagian sehingga belum menggambarkan nilai seluruh aset yang dimiliki oleh BUMDes. Begitupun dengan akumulasi penyusutan yang tidak dicantumkan nilainya karena basis akuntansi yang diterapkan adalah basis kas. Berdasarkan hasil analisis

yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa neraca yang dibuat BUMDes Mawa Raharja pada tahun 2020 belum menerapkan SAK ETAP dengan tepat. Selain itu, neraca ini terakhir dibuat pada tahun 2020 dan tidak dilanjutkan setelah periode revitalisasi, sehingga BUMDes Mawa Raharja pada tahun 2022 pun belum menerapkan SAK ETAP dikarenakan tidak membuat neraca.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi dibuat pada setiap unit usaha terlebih dahulu baru kemudian digabungkan untuk di laporkan ke Pemerintah Desa Cibiru Wetan. Periode laporan laba rugi ini adalah satu tahun yang diawali pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berikut adalah model pencatatan laporan laba rugi yang dibuat oleh BUMDes Mawa Raharja periode 31 Desember 2022.

Tabel 2. Model Laporan Laba Rugi BUMDes Mawa Raharja per 31 Desember 2022

Selama Tahun 2022, BUMDesa Mawa Raharja Desa Cibiru Wetan telah mendapat penghasilan dari berbagai usaha yang telah dilaksanakan sebesar Rpxxx dengan pendistribusian sebagai berikut	
1. Pajak	: Rp xxx
2. PAD	: Rp xxx
3. Dana Sosial	: Rp xxx
4. Tambahan Modal	: Rp xxx
5. Dana Pendidikan	: Rp xxx
6. Operasional	: Rp xxx
7. Bonus Pencapaian	: Rp xxx
8. Penasehat	: Rp xxx
9. Pengawas	: Rp xxx

Sumber: Dokumentasi Laporan Laba Rugi BUMDes Mawa Raharja per 31 Desember 2022

Mengacu pada SAK ETAP, minimal laporan laba rugi memuat pendapatan dari usaha, beban-beban keuangan, bagian rugi atau laba dari investasi dengan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi bersih. Sementara itu, pada laporan laba rugi yang dibuat BUMDes Mawa Raharja ini sudah memuat pendapatan bersih yang dihasilkan dari seluruh unit usaha beserta pengalokasiannya terhadap sembilan bagian yang tertera pada tabel di atas. Oleh karena itu, pendapatan bersih yang disajikan sudah merupakan laba bersih dari masing-masing unit usaha sehingga tidak terdapat rincian beban keuangan, seperti beban gaji dari masing-masing unit usaha. Selain itu, karena basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas sehingga BUMDes Mawa Raharja belum memperhitungkan beban-beban yang muncul secara akrual, seperti beban penyusutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Mawa Raharja ini belum mematuhi SAK ETAP dalam penyusunan laporan laba rugi.

Di samping itu, direktur BUMDes Mawa Raharja, Ibu Lani, menyebutkan bahwa untuk pengalokasian pendapatan bersih itu tercantum dalam AD/ART, salah satunya yaitu 30% dari pendapatan bersih BUMDes dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa dan untuk rata-rata

pendapatan bersih BUMDes setiap tahunnya adalah pada kisaran 50 juta. Selain itu, analisis perbandingan laporan laba rugi sudah dilakukan oleh para pengurus untuk kebutuhan internal, tetapi tidak disertakan dalam laporan. Analisis kelangsungan usaha juga sudah dilakukan secara sederhana oleh pengurus harian bersama dengan pengawas BUMDes untuk menilai potensi usaha dari seluruh unit usaha yang dimiliki.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas terakhir dibuat BUMDes Mawa Raharja pada tahun 2020, yaitu sebelum dilakukan revitalisasi. Berikut adalah contoh model Laporan Perubahan Ekuitas bulan Januari yang dibuat oleh BUMDes Mawa Raharja

Tabel 3. Model Laporan Perubahan Ekuitas BUMDes Mawa Raharja per 31 Januari 2020

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Modal Awal Raksa Desa	xxx
	Modal Awal Desa Peradaban	xxx
	Perdagangan & Jasa	xxx
2	Laba Bulan Lalu	xxx
3	Laba Bulan Ini	xxx
4	Mesin Molen	xxx
5	Modal Akhir	xxx

Sumber: Dokumentasi Laporan Perubahan Ekuitas BUMDes Mawa Raharja per 31 Januari 2020

Berdasarkan ketentuan laporan perubahan ekuitas yang tertera pada SAK ETAP, minimal laporan perubahan modal tersebut memuat laba atau rugi periode berjalan, pendapatan dan beban yang diakui pada pos ekuitas, serta koreksi kesalahan dan pengaruh perubahan kebijakan akuntansi yang diakui dalam periode berjalan. Dalam laporan perubahan ekuitas BUMDes Mawa raharja pada tahun 2020 ini sudah memuat modal awal, laba pada periode tersebut, dan modal akhir. Namun, terdapat beberapa akun yang tidak perlu dicantumkan di laporan perubahan ekuitas, yaitu perdagangan & jasa, laba bulan lalu, dan mesin molen karena perdagangan & jasa seharusnya dicantumkan dalam laporan laba rugi, sedangkan laba bulan lalu tidak perlu dicantumkan kembali, dan mesin molen seharusnya dicantumkan dalam neraca. Untuk itu, kesimpulannya adalah laporan perubahan ekuitas yang dibuat BUMDes Mawa Raharja pada tahun 2020 belum menerapkan SAK ETAP dengan tepat. Selain itu, laporan perubahan ekuitas ini terakhir dibuat pada tahun 2020 dan tidak dilanjutkan setelah periode revitalisasi, sehingga BUMDes Mawa Raharja pun saat ini tidak menerapkan SAK ETAP karena tidak membuat laporan perubahan ekuitas.

d. Laporan Arus Kas

Berdasarkan SAK ETAP, laporan arus kas merupakan salah satu laporan yang harus dibuat oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Sementara itu, BUMDes Mawa Raharja baru

mampu membuat buku kas masuk dan buku kas keluar sehingga belum membuat laporan arus kas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Mawa Raharja belum menerapkan SAK ETAP karena belum membuat laporan arus kas.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berdasarkan SAK ETAP, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah catatan pelengkap yang harus dibuat oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Sementara itu, BUMDes Mawa Raharja belum membuat CaLK yang disyaratkan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Mawa Raharja belum menerapkan SAK ETAP karena belum membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Mengacu pada hasil analisis, diperoleh suatu simpulan bahwa secara garis besar BUMDes Mawa Raharja dalam penyusunan laporan keuangannya ini belum menerapkan SAK ETAP yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, jumlah karyawan yang terbatas dan juga tidak berlatar belakang dari jurusan akuntansi sehingga sulit dalam memahami laporan keuangan secara utuh. Proses rekrutmen karyawan BUMDes yang belum sematang proses rekrutmen perusahaan menjadi kendala dalam penerimaan karyawan. Kedua, pengurus BUMDes merasa bingung untuk memulai membenahi laporan keuangan yang benar karena mereka juga dituntut untuk menyelesaikan administrasi keuangan di setiap tahunnya sehingga para karyawan merasa tidak memiliki waktu luang untuk meninjau ulang laporan keuangan.

Selain itu, lima unit usaha BUMDes yang bergerak dalam lima bidang yang berbeda pun cukup menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Kelima bidang tersebut tentunya membutuhkan perlakuan yang berbeda dalam pengelolaan keuangannya. Di samping itu belum adanya sosialisasi atau pelatihan secara khusus mengenai pelaporan keuangan, baik itu dari pemerintah desa maupun dari pihak lain, menjadi faktor penghambat dalam penerapan SAK ETAP di BUMDes Mawa Raharja.

Penelitian ini selaras dengan analisis dari beberapa penelitian sebelumnya yang juga menemukan permasalahan kepatuhan BUMDes terhadap SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan. Di antaranya adalah, penelitian Arafah, Inapty, dan Astuti (2022) yang menyebutkan bahwa sebagian BUMDes di Kecamatan Lambu telah menyusun laporan keuangan, tetapi belum sesuai dengan SAK ETAP yang disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan ilmu akuntansi yang dimiliki oleh para pengelola BUMDes. Kemudian penelitian Pramitari, Nurhayanti, dan Suningsih (2020) juga menemukan bahwa dalam penyusunan laporan keuangannya, BUMDes di Desa Buduk belum menerapkan SAK ETAP sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak mampu menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya.

Selain itu, dalam penelitian Rozalia, Anitasari, dan Ferina (2021) diungkapkan juga bahwa BUMDes Luhur Sepakat di Desa Sido Luhur belum membuat laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CaLK sehingga BUMDes tersebut belum menerapkan SAK ETAP

dengan tepat. Hal ini juga elaras dengan riset Afkarina, Probowulan, dan Maharani (2022) yang menunjukkan bahwa BUMDes Arum Jaya Mandiri di Desa Jambearum Kabupaten Jember yang baru membuat neraca dan laporan laba rugi saja sehingga BUMDes tersebut belum menerapkan SAK ETAP secara penuh.

4. CONCLUSION

Pada tahun 2020, atau pada periode sebelum revitalisasi, BUMDes Mawa Raharja ini dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan SAK ETAP yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, yang dibuat belum memenuhi ketentuan SAK ETAP secara tepat. Kedua, BUMDes Mawa Raharja pun belum membuat laporan arus kas dan CaLK. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa BUMDes Mawa Raharja pada tahun 2020 belum menerapkan SAK ETAP. Selain itu, pada periode setelah revitalisasi, termasuk pada tahun 2022, SAK ETAP belum diterapkan oleh BUMDes Mawa Raharja secara tepat dikarenakan terdapat laporan keuangan yang belum dibuat. Seperti neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CaLK. Laporan laba rugi yang telah disusun pun belum dapat memenuhi ketentuan SAK ETAP.

Terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan BUMDes Mawa Raharja belum dapat menerapkan SAK ETAP, di antaranya adalah karena jumlah karyawan yang masih sangat terbatas dan latar belakang pendidikan karyawan yang tidak selaras dengan posisi yang dibutuhkan. Contohnya, bendahara yang bukan berlatar pendidikan akuntansi. Oleh karena itu, pengetahuan akuntansi karyawan BUMDes yang masih sangat terbatas itulah membuat BUMDes Mawa Raharja dalam pengelolaan keuangannya ini belum dapat menerapkan SAK ETAP. Hal ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya bahwa kendala terbesar dalam penerapan SAK ETAP oleh BUMDes disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan kemampuan karyawan BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan sehingga pemerintah desa harus menaruh perhatian pada permasalahan ini untuk dapat ditemukan solusinya.

6. REFERENCES

- Afkarina, F. N., Probowulan, D., & Maharani, A. (2022). Penerapan SAK ETAP Pada BUMDes Arum Jaya Mandiri Desa Jemberarum Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 1075-1081.
- Arafah, S., Inapty, B. A., & Astuti, R. D. (2022). Analisis Implementasi SAK ETAP pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus pada BUMDes di Kec. Lambu Kabupaten Bima). *Jurnal Risma*, 2(3), 498-505.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Palupi, A. I. (2021). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Bumdes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 1–28.

- Pramitari, I. G., Nurhayanti, K., & Suningsih, S. L. (2020). Penerapan SAK ETAP pada Unit Jasa Pengelolaan Sampah BUMDes Desa Buduk. *SENTRINOV (Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif Ke-6)*, 6(2), 246-253.
- Rachmapurnami, D. A. (2021). Tinjauan Yuridis Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. *Jurnal Officium Notarium*, 1(2), 360–369.
- Rozalia, S., Anitasari, M., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Penerapan SAK ETAP Pada BUMDes Luhur Sepakat Desa Sido Luhur Kabupaten Bengkulu Utara. *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 1(1), 19-28.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(2), 139.
- Susanto, A. (2018). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Bumi Patalo di Desa. *Finest: Jurnal Riset Dan Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(1), 23–31.